



Bantul Minta Buang Sampah ke Piyungan

DESENTRALISASI SAMPAH DI BUMI MATARAM

Pemda DIY telah menutup TPA Piyungan sejak beberapa waktu lalu. Kini pengolahan sampah dilakukan secara desentralisasi di masing-masing daerah.

Kabupaten Bantul

Kondisi Penuh

- Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Gading Sari

Tahap Pembangunan

- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) Modalan
- Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Dingkikan
- Intermediete Treatment Facility (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran

Dihentikan Sementara

- Proyek TPSS di Puncak Bucu yang diproyeksikan menggantikan TPSS Gading Sari dihentikan sementara menyusul adanya penolakan dari warga Sitimulyo.



Kota Jogja

Sudah Beroperasi

- Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Nitikan
- Kapasitas pengolahan sampah di tempat ini mencapai 70 ton/hari
- Sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif Refused Derived Fuel (RDF).

Kabupaten Sleman

- Kabupaten Sleman memiliki 32 tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* (TPS3R) yang tersebar di berbagai wilayah Bumi Sembada.
- Satu TPS3R mampu mengelola sampah dari 500-700 KK.

Operasional TPST

- TPST Tamanmartani, Kalasan sudah beroperasi dengan kapasitas 60 ton/hari.
- TPST Sleman Tengah baru baru tahap perencanaan dengan kapasitas 90 ton/hari.
- TPST Sendangsari, Kapanewon Minggir dengan kapasitas optimal 60 ton sampah per hari masih dalam tahap pembangunan.



Proses Pembangunan

- TPS3R Kranon dengan kapasitas 30 ton
- TPS3R Karangmiri dengan kapasitas 30 ton

BANTUL-Darurat sampah tak hanya terjadi di Kota Jogja. Kabupaten Bantul kini mengalaminya.

Jumali & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

► **Pemkab Bantul kini juga mencari lahan pengganti TPSS Gading Sari.**

► **Pemda DIY telah menerima permintaan izin dari Pemkab Bantul soal rencana pembuangan sampah ke TPA Piyungan.**

Pemkab Bantul meminta izin Pemda DIY untuk bisa membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Hal ini dilakukan setelah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Wonoroto, Gading Sari, Sanden, Bantul, ditutup karena lahan yang terbatas.

Kondisi itu ditambah dengan belum rampungnya pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Dingkikan, TPST Modalan dan *Intermediete Treatment Facility* (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran. Selain meminta izin untuk kembali membuang sampah di TPA Piyungan, Pemkab Bantul kini juga mencari lahan pengganti TPSS Gading Sari.

Bantul Minta...

"Jadi saat ini ada beberapa titik [lokasi pembangunan TPSS] sedang kami cari, sambil mempercepat pembangunan TPST Dingkikan, Modalan dan ITF Bawuran," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Jumat (19/7).

Halim menyatakan pembangunan TPST Dingkikan, TPST Modalan, terus dilanjutkan dan diperkirakan September sudah bisa beroperasi. Untuk mengatasi persoalan sampah, Pemkab Bantul meminta izin ke Pemda DIY agar bisa membuang sampah di TPA Piyungan.

"Kami masih memohon kepada Ngarsa Dalem [Gubernur DIY Sri Sultan HB X] untuk memanfaatkan sisa kapasitas TPA Piyungan. Selama ini kan yang memanfaatkan Sleman dan Kota. Bantul yang punya tidak menggunakan itu," kata Halim.

Menurut Halim, selama ini, sampah yang ada dan dikelola oleh pengusaha sampah di Bantul juga berasal dari Kota Jogja. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja juga telah menitipkan sampah ke Bantul. Dengan demikian, Halim menilai Bantul telah ikut serta menyelesaikan problem sampah di Kota Jogja.

"TPSS Gadingari sudah selesai sehingga cari alternatif lain. Untuk lokasi [TPSS], saya belum bisa pastikan, tunggulah dua sampai tiga hari ini sudah deal dan sifatnya sementara saja," papar Halim.

Halim memastikan menggunakan *Sultan Grond* untuk lokasi TPSS. Lokasi pembangunan TPSS diupayakan oleh Pemkab Bantul jauh dari permukiman. Halim mengakui ada dampak dari keberadaan TPSS. "Tapi tolong dipahami ini darurat, sementara saja. Kalau semua nolak,

kita buang sampah ke mana? Di laut kan enggak boleh. Tolong sekali ini masalah kita bersama. Jika semua ditolak enggak selesai. Ini sementara saja, sambil menunggu TPST yang hampir jadi karena kami tidak hanya mengolah sampah di Bantul saja," ucap Halim.

Kepala DLH Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan instansinya terus mencari lokasi untuk pendirian TPSS dan melakukan pendekatan kepada warga agar tidak ada penolakan terkait dengan keberadaan TPSS. "Kami juga komunikasikan dengan Pemda DIY. Sehingga mungkin nanti ada arahan dari Pemda DIY, kami akan menunggu," kata Bambang.

Beri Lampu Hijau

Pemda DIY menyatakan telah menerima permintaan izin dari Pemkab Bantul soal rencana pembuangan sampah ke TPA Piyungan.

"Sudah kami terima suratnya dari Pak Bupati Bantul. Isinya permintaan izin untuk membuang sampah sementara di Piyungan karena kondisi darurat," kata Sekda DIY, Beny Suharsono.

Beny mengatakan Pemda DIY memberikan lampu hijau atas permintaan Pemkab Bantul itu. Menurutnya provinsi tidak akan lepas tangan dengan munculnya persoalan sampah di tingkat kabupaten kota akibat program desentralisasi sampah dan penutupan permanen TPA Piyungan. "Kami tentu tidak lepas tangan kalau ada persoalan di kabupaten kota, harus kami dampingi," ujarnya.

Tidak hanya Kabupaten Bantul, Beny menyebut hal serupa juga pernah dialami Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Saat kedua wilayah itu

tidak lagi sanggup menahan beban tumpukan sampah, TPA Piyungan menjadi solusi sementara. "Nanti sifatnya kerja sama langsung antara Pemda DIY dengan Pemkab Bantul," katanya.

Beny menambahkan surat permintaan izin itu juga telah disampaikan ke DLHK DIY untuk segera ditelaah dan dicermati. Instansi itu yang akan mengatur pembagian jadwal pembuangan sampah bagi daerah yang memanfaatkan TPA Piyungan. "Ruang untuk membuang sampah itu masih ada di TPA Piyungan. Pemda memang harus menyiapkan beragam skema jika kabupaten kota mengalami kendala mengatasi sampah," ujar dia.

Ditolak Warga

Sementara itu, pembangunan TPSS di Puncak Bucu, Kalurahan Srimulyo, Piyungan, Bantul sementara dihentikan karena ada penolakan warga.

Pembangunan TPSS tersebut dalam pematangan lahan dan pembuatan jalan. Pembangunan TPSS ini diproyeksikan menggantikan TPSS Gadingari.

Kepala DLH Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi, Nugroho mengatakan harus ada jaminan keamanan saat nanti pembangunan dilanjutkan. "Keamanan itu tidak hanya untuk alat tapi juga personel di sana. Artinya harus ada dukungan kuat, agar nantinya tidak ada masalah," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan pembangunan TPST terus dipercepat. Saat ini alat pengolahan sampah di TPST Dingkikan dari sampah menjadi RDF saat ini telah ada dan harus di-setting.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005